

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Agar dapat bertahan dan bersaing untuk mencapai tujuan yang diinginkan, bisnis harus bekerja lebih keras untuk meningkatkan kinerja, mengembangkan inovasi, dan memperluas bisnis mereka di era globalisasi karena perkembangan dunia bisnis dan sifat pasar bisnis yang semakin kompetitif. Mereka yang mampu bersaing akan mampu bertahan, sementara mereka yang tidak mampu melakukannya akan gulung tikar. Aktivitas penjualan baik tunai maupun kredit sangat penting bagi bisnis dalam mencapai tujuan utamanya untuk mendapatkan keuntungan maksimum (Agustinawati, 2019 ).

Dari perspektif global, diakui bahwa UMKM memainkan peran penting dalam pertumbuhan ekonomi dan pembangunan, tidak hanya di negara-negara berkembang seperti Indonesia tetapi juga di negara-negara kaya seperti Jepang, Amerika Serikat, dan negara-negara di Eropa. Pentingnya UMKM di Indonesia sering dibahas di media dan di lokakarya dan seminar, terutama sebagai sumber peningkatan kesempatan kerja atau pendapatan. Namun, kenyataannya adalah bahwa kelompok bisnis ini sebenarnya menciptakan peluang kerja yang jauh lebih banyak daripada yang dapat diserap oleh perusahaan besar (Alfiyah, 2019).

Usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) merupakan kegiatan usaha yang dapat meningkatkan lapangan kerja, menjadi fondasi pemerataan kekayaan di antara masyarakat, dan meningkatkan pendapatan masyarakat, yang semuanya memiliki dampak positif yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah dan nasional ( Mihani,2020 ) .

Usaha mikro didefinisikan sebagai usaha produktif yang dimiliki oleh perorangan atau badan usaha perseorangan dengan nilai aset paling banyak Rp. 50 juta atau dengan penjualan tahunan paling banyak Rp. 300 juta, menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM. Usaha kecil adalah perusahaan menguntungkan yang dijalankan oleh orang atau badan hukum yang bukan anak perusahaan atau cabang dan memiliki penjualan tahunan minimal Rp. 300 juta dan sampai dengan Rp. 25 milyar, atau nilai aset minimal Rp. 50 juta dan sampai dengan Rp. 500 juta. Perusahaan menengah adalah perusahaan yang menguntungkan dengan kekayaan bersih antara Rp. 500 juta dan Rp. 10 milyar, atau antara Rp. 2,5 milyar dan Rp. 50 miliar dalam penjualan tahunan.

Dalam proses mengembangkan usahanya, UMKM menghadapi sejumlah permasalahan. Selain lemahnya sumber daya manusia, keterbatasan sarana, prasarana dan teknologi, faktor utama penghambat berkembangnya UMKM adalah kurangnya permodalan dan terbatasnya akses pembiayaan. Jadi, memerlukan sesuatu yang disebut modal kerja. Modal kerja sangat penting bagi bisnis. Apabila suatu usaha tidak mempunyai modal kerja yang cukup maka usahanya akan sulit dijalankan. Tanpa modal kerja yang cukup maka perusahaan akan kehilangan kesempatan untuk meningkatkan jumlah dan mutu produk yang dihasilkan. Hal ini tentunya dapat menimbulkan kendala dalam menjalankan usaha dan tentunya dapat merugikan pertumbuhan penjualan yang erat kaitannya dengan kebutuhan modal kerja. Bisnis yang sedang berkembang melakukan berbagai aktivitas, termasuk aktivitas produksi dan pemasaran, keduanya merupakan jenis aktivitas yang memerlukan modal yang memadai. Suatu usaha yang tumbuh dan berkembang tanpa dukungan modal kerja yang kuat akan layu dan akhirnya mati. Oleh karena itu, dapat dikatakan modal kerja merupakan ruh atau tenaga dalam yang menggerakkan segala kegiatan usaha ( Kartawan, 2011 ).

Biasanya lembaga keuangan yang syariah menyalurkan modalnya dengan menerapkan sistem pembiayaan pembagian penghasilan. Menurut Yunus (2015), bagi hasil yang merupakan ciri yang paling dasar lembaga keuangan syariah adalah suatu sistem yang memuat tata cara bagi hasil usaha antara investor dan pengelola dana dengan mengedepankan prinsip keadilan dan kerjasama penanaman modal yang cocok. Kedua belah pihak harus menunjukkan keseriusan dan tanggung jawab dalam memenuhi keharusan untuk mengurangi tingkat kredit bermasalah. Hasil atau manfaat yang diperoleh akan dibagi menurut hubungan keluarga yang disepakati para pihak. Kalau keuntungannya besar, maka bagi hasil juga besar. Berbeda dengan bank konvensional yang menggunakan bentuk suku bunga untuk memperoleh laba, sehingga laba yang diperoleh pelanggan tetap, baik bank tersebut memperoleh laba besar atau kecil. Oleh karena itu, adanya bagi hasil dalam pembiayaan syariah dapat mempengaruhi tingkat bunga pembiayaan, karena bagi hasil dapat menguntungkan nasabah dan meminimalisir kerugian yang besar bagi nasabah khususnya UMKM.

Kredit adalah bentuk penyaluran modal kepada masyarakat, berguna dalam membantu baik perorangan maupun dunia usaha yang membutuhkan modal, sehingga kredit sudah menjadi fungsi utama bank karena memenuhi peraturan Bank. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan yang menyatakan bahwa bank adalah lembaga komersial yang menghimpun uang masyarakat dalam bentuk tabungan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk lain untuk memajukan kesejahteraan masyarakat. Dibandingkan dengan produk dan layanan yang diberikan bank, penghasilan atau laba bank berasal dari pemberian pinjaman yang lebih banyak kepada nasabah. Namun, ketika menyalurkan uang dalam bentuk kredit kepada nasabah, ada risiko uang atau kredit yang telah dicairkan tidak dapat dikembalikan. Mengingat risiko tersebut, bank harus selalu melakukan analisis menyeluruh terhadap

setiap permintaan kredit yang diterimanya. Berdasarkan uraian di atas, menunjukkan bahwa UMKM dalam menjalankan usahanya membutuhkan modal untuk usahanya, kebutuhan modal itu bisa diperoleh melalui peminjaman modal dengan kredit di Bank Syariah.

Jenis kredit yang bisa dimanfaatkan bagi UMKM yaitu Kredit Usaha Rakyat (KUR). Kredit Usaha Rakyat (KUR) yaitu pembiayaan yang diberikan oleh koperasi usaha kecil dan menengah (UMKM-K) dengan cara modal kerja dan penanaman modal didukung dengan layanan penjaminan bagi usaha manufaktur. Kredit usaha populer ini diluncurkan oleh Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 5 November 2007. KUR adalah layanan keuangan bagi UMKM dan koperasi, terpenting lagi yang mempunyai bisnis memadai namun belum mampu meminjam modal. Artinya perusahaan tersebut mempunyai peluang usaha yang baik dan mampu menjadikan usahanya menguntungkan (Dwi Nugraheni, 2011).

Rencana penyebaran KUR yang dicanangkan pemerintah tidak hanya dilaksanakan melalui layanan perbankan konvensional tetapi juga melalui layanan perbankan syariah, termasuk Bank Jateng Syariah. Bank Jateng Syariah merupakan bank yang diberikan izin oleh pemerintah untuk menyalurkan modal dari rencana Kredit Usaha Rakyat. KUR Syariah Jateng adalah rencana pembiayaan usaha bagi usaha UMKM (usaha kecil dan menengah). Bank Jateng Syariah menawarkan program KUR Syariah. Program ini menawarkan keunggulan tanpa adanya bunga namun dengan margin keuntungan sebesar 0,2% per bulan, dengan maksimal pinjaman hingga Rp. 500 Juta. Jangka waktu atau tenor pinjamannya pun bervariasi, dari awal 12 bulan hingga 5 tahun, tergantung pinjaman apa yang akan diambil oleh nasabah (Radar Group, 2023) .

Berdasarkan data realisasi KUR dari tahun 2021 dan 2022 Bank Jateng Kantor Cabang Syariah Pekalongan menunjukkan bahwa minat nasabah untuk melaksanakan Kredit Usaha Rakyat (KUR) meningkat signifikan, sehingga berpengaruh besaran KUR yang diharapkan. Pada 2021 besaran realisasinya KUR adalah Rp. 19,2 Triliun kemudian pada tahun 2022 mengalami kenaikan 45% menjadi RP. 27,8 Triliun. Maka, penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut terhadap Kredit Usaha Rakyat pada Bank Jateng Kantor Cabang Syariah Pekalongan, dan menuangkannya dalam bentuk laporan tugas akhir dengan judul “Analisis Sistem dan Prosedur Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Pada Bank Jateng Syariah Kantor Cabang Pekalongan”.

## **1.2 Perumusan Masalah**

Dalam pengambilan judul tentang Analisis Sistem dan Prosedur Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat pada Bank Jateng Kantor Cabang Syariah Pekalongan, penulis bermaksud untuk membahas tentang :

1. Fungsi-fungsi apa saja yang terkait dengan sistem pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada Bank Jateng Kantor Cabang Syariah Pekalongan ?
2. Dokumen-dokumen apa saja yang diperlukan atas pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada Bank Jateng Kantor Cabang Syariah Pekalongan ?
3. Catatan-catatan akuntansi apa saja yang dibutuhkan dalam pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada Bank Jateng Kantor Cabang Syariah Pekalongan ?
4. Bagaimana sistem pengendalian internal dalam pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada Bank Jateng Kantor Cabang Syariah Pekalongan ?
5. Bagaimana prosedur pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada Bank Jateng Kantor Cabang Syariah Pekalongan ?

6. Bagaimana kendala yang dihadapi Bank Jateng Kantor Cabang Syariah Pekalongan dalam Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) ?

### **1.3 Tujuan Tugas Akhir**

Tujuan yang ingin penulis capai adalah menganalisis sistem dan prosedur pembiayaan kredit usaha rakyat pada Bank Jateng Kantor Cabang Syariah Pekalongan meliputi :

1. Untuk mengetahui fungsi-fungsi yang terkait dengan sistem pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada Bank Jateng Kantor Cabang Syariah Pekalongan ?
2. Untuk mengetahui dokumen-dokumen yang diperlukan atas pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada Bank Jateng Kantor Cabang Syariah Pekalongan ?
3. Untuk mengetahui catatan-catatan akuntansi yang dibutuhkan dalam pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada Bank Jateng Kantor Cabang Syariah Pekalongan?
4. Untuk mengetahui sistem pengendalian internal dalam pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada Bank Jateng Kantor Cabang Syariah Pekalongan ?
5. Untuk mengetahui prosedur pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada Bank Jateng Kantor Cabang Syariah Pekalongan ?
6. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi Bank Jateng Kantor Cabang Syariah Pekalongan dalam Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) ?

### **1.4 Kegunaan Tugas Akhir**

1. Bagi Penulis

Sebagai salah satu syarat kelulusan Program Diploma Tiga Program Studi Akuntansi di Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Pekajangan Pekalongan.

## 2. Bagi Akademik

Laporan tugas akhir ini dapat dijadikan acuan mahasiswa yang akan melakukan penelitian serupa pada masa yang akan datang.

## 3. Bagi Bank Jateng KCS Pekalongan

Hasil laporan tugas akhir diharapkan dapat menjadi kontribusi yang dapat diperhitungkan dalam penilaian dan penyempurnaan kegiatan pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat (KUR).

### **1.5 Metode Tugas Akhir**

#### 1. Sasaran Tugas Akhir

Kajian mendalam ini fokus pada tata cara pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) kepada calon debitur Bank Jateng Cabang Syariah Pekalongan.

#### 2. Lokasi Tugas Akhir

Lokasi penelitian di Bank Jateng Kantor Cabang Syariah Pekalongan beralamat :

Alamat : Jl. Imam Bonjol No. 38, Kergon, Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan, Jawa Tengah.

Telp : (0285) 422290

#### 3. Jenis Tugas Akhir

##### a. Jenis Penelitian

Penelitian lapangan cocok untuk digunakan dalam penelitian ini. Peneliti memperoleh data dengan mencatat dan mengumpulkan berbagai informasi yang dapat diidentifikasi di lapangan, memperoleh data dari pemangku kepentingan untuk mempelajari prosedur pendanaan KUR pada produk pembiayaannya Bank Jateng KCS Pekalongan kepada calon debitur melalui tanya jawab, pengamatan dan catatan.

b. Pendekatan Penelitian

Pendekatan kualitatif merupakan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini. Penelitian ini menghasilkan data deskriptif dalam bentuk lisan atau tulisan tentang orang-orang yang terlibat dan perilaku. Memanfaatkan data penting langsung dari pihak terlibat pembiayaan KUR pada produk pembiayaan Bank Jateng KCS Pekalongan dengan melakukan tanya jawab.

4. Metode Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara adalah suatu cara mengumpulkan informasi dengan menggunakan tanya jawab langsung kepada tim analis Bank Jateng KCS Pekalongan sekaligus meminta data kepada ketua tim analis yang berkaitan dengan jumlah dana pembiayaan KUR pada Bank Jateng KCS Pekalongan tahun 2021 sampai 2022 .

b. Observasi

Observasi adalah cara mengumpulkan informasi yang dilakukan langsung di lapangan terkait dengan pelaksanaan pembiayaan KUR di Bank Jateng KCS Pekalongan.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah cara yang digunakan untuk prosedur pengumpulan informasi dengan mempelajari arsip-arsip dan publikasi lain yang berkaitan dengan permasalahan yang dibicarakan, terutama terkait dengan pemberian pembiayaan KUR di Bank Jateng KCS Pekalongan kepada calon debitur .

5. Sumber data

a. Sumber data primer

Informasi yang dikumpulkan langsung dari penelitian dengan menggunakan alat ukur atau pengumpulan data oleh subjek langsung yang diamati. Data utama yang peneliti peroleh mengenai tata cara pembiayaan KUR pada produk pembiayaan KUR Bank Jateng KCS Pekalongan berasal dari hasil tanya jawab dengan pihak yang terlibat dalam judul penelitian ini.

b. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder adalah informasi yang didapat dari informasi media cetak dan bahan literatur lain yang berkaitan dengan permasalahan yang dibicarakan, khususnya tata cara pembiayaan KUR pada produk pembiayaan KUR Bank Jateng KCS Pekalongan.

## **1.6 Sistematika Tugas Akhir**

Pembahasan hasil penelitian dirangkum menjadi lima bab yang saling berhubungan. Sebelum masuk ke bab pertama, dimulai dengan: Halaman sampul, halaman judul, halaman pengesahan, halaman pernyataan, halaman motto, halaman kata pengantar, halaman daftar isi, halaman daftar tabel, halaman daftar gambar, dan halaman daftar lampiran.

### **BAB I: PENDAHULUAN**

Pada bab ini merupakan bab pendahuluan yang menjelaskan uraian mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah yang diangkat, tujuan tugas akhir, kegunaan tugas akhir, metode tugas akhir, dan sistematika tugas akhir.

### **BAB II: TINJAUAN PUSTAKA**

Pada bab ini penulis menguraikan mengenai teori-teori maupun konsep-konsep yang berhubungan erat dengan judul dan pokok bahasan laporan. Meliputi pengertian sistem, pengertian prosedur, tujuan prosedur, karakteristik

prosedur, pengertian pengendalian internal, pengertian sistem informasi akuntansi, pengertian pembiayaan, tujuan pembiayaan, fungsi pembiayaan, unsur-unsur pembiayaan, faktor yang menentukan pembiayaan, pengertian kredit usaha rakyat (KUR), ketentuan KUR Syariah, syarat penerima KUR Syariah, jenis-jenis KUR Syariah, syarat pengajuan KUR, dan bagan alir .

### **BAB III : GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN**

Penulisan menguraikan tentang segala sesuatu yang terkait dengan gambaran umum instansi meliputi gambaran umum Bank Jateng Kantor Cabang Syariah Pekalongan, sejarah dan perkembangan Bank Jateng Syariah, visi dan misi Bank Jateng Syariah, nilai-nilai dan budaya kerja Bank Jateng, identitas perusahaan, struktur organisasi Bank Jateng KCS Pekalongan, aktivitas Bank Jateng KCS Pekalongan, pemasaran produk di Bank Jateng KCS Pekalongan.

### **BAB IV: HASIL DAN PEMBAHASAN**

Pada bab ini penulis menguraikan hasil dan pembahasan penelitian tentang fungsi-fungsi yang terkait dengan sistem pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada Bank Jateng Kantor Cabang Syariah Pekalongan, dokumen-dokumen yang diperlukan atas pembiayaan KUR pada Bank Jateng KCS Pekalongan, catatan-catatan akuntansi yang dibutuhkan dalam pembiayaan KUR pada Bank Jateng KCS Pekalongan, sistem pengendalian internal dalam pembiayaan KUR pada Bank Jateng KCS Pekalongan, prosedur pembiayaan KUR pada Bank Jateng KCS Pekalongan, dan kendala yang dihadapi dalam pembiayaan KUR di Bank Jateng KCS Pekalongan.

## BAB V: PENUTUP

Bab ini berisi tentang bagian akhir dari seluruh penulisan laporan tugas atas akhir, pada bab ini ditarik kesimpulan dari apa yang telah diuraikan pada bab sebelumnya serta memberikan saran-saran perbaikan sesuai dengan kemampuan penulis.